

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kondisi pergerakan harga di Kabupaten Buru Selatan, secara terkhusus Kota Namrole pada awal tahun 2024 bulan Januari tidak berbeda jauh dengan bulan Desember kecuali pada beberapa item komoditi pangan yang bersumber dari petani lokal serta bahan makanan yang dibawa dari Kabupaten Buru (Unit - Namlea), untuk komoditi beras masih stabil untuk jenis Medium dengan pergerakan harga Januari hingga Maret Rp.16.000/kg sementara Beras Premium Rp.18.000/kg dan berfluktuasi hingga Rp.20.000/kg sejak minggu ke-2 bulan Maret 2024.

Komoditi lain seperti Cabe Rawit bergerak turun dari Rp.100.000/kg menjadi Rp.45.000 - Rp.40.000/kg pada Februari 2024 dan bertahan sampai akhir bulan Maret menjelang Hari Raya Idul Fitri. Cabe Keriting Rp. 60.000/kg menjadi Rp.35.000 - Rp. 40.000/kg pada bulan Maret 2024. Bawang Putih dan Bawang Merah pun bergerak turun pasca triwulan I 2024 ini dengan tekanan harga yang dapat di kontrol dengan baik, dari harga Rp. 50.000/kg menjadi Rp.30.000/kg untuk bawang merah dan Rp.45.000/kg untuk bawang putih menjelang Bulan Ramadhan 1445 H. Telur pun bergerak dari harga Rp.75.000/rak di bulan Januari, Rp.67.000/rak di bulan Februari hingga akhir Maret pada minggu ke-3 harga telur turun menjadi Rp.65.000/rak.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H pun stok daging sapi dan ayam masih tersedia dengan harga yang masih stabil hingga minggu ke - 4 bulan Maret Rp.120.000/kg untuk daging sapi, sementara daging ayam masih stabil pada harga Rp.50.000/kg. Gula Pasir per kilogramnya masih stabil dengan harga Rp.19.000/kg, Minyak Goreng Rp.20.000 - Rp.26.000/kg, Susu kemasan kaleng masih stabil dengan harga Rp.13.000 - Rp.14.000/kaleng 370gr dan tepung terigu masih stabil juga dengan harga Rp.14.000 - Rp.15.000/kg, kacang tanah dan kacang hijau pun masih stabil di harga Rp.33.000/kg untuk kacang tanah dan Rp.25.000/kg untuk kacang hijau.

Kondisi harga di Kota Namrole masih belum mengalami perubahan yang signifikan menjelang H - 10 Hari Raya Idul Fitri dan kemungkinan akan bergerak berubah pada H - 7 Idul Fitri mendatang seiring stok barang baru masuk melalui dari Kota Namlea, maupun KotanAmbon melalui Kota Namlea maupun langsung.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pergolakan harga beras sangat berdampak akibat kondisi daerah yang tidak memiliki lumbung sendiri, sehingga masih bergantung pada beras dari wilayah pertanian di Unit - Namlea (Kabupaten Buru) dengan kisaran harga jual Rp.16.000/kg, selain itu beras juga kita supply dari Surabaya lewat jalur Tol Laut dengan harga Rp.18.000 - Rp.20.000/kg serta beras dari Ambon dengan harga Rp.19.000 - Rp.20.000/kg. Namun, kondisi harga ini dapat berubah akibat cuaca ekstreme yang mengurangi supply ke Kota Namrole - Kabupaten Buru Selatan. Sehingga kami hanya dapat menjangkau beras lewat jalur darat dari Unit - Kabupaten Buru dengan harga dapat berfluktuasi hingga Rp.18.000 - Rp.20.000/kg untuk beras kelas Medium dan jalur Tol Laut dengan keterlambatan pelayaran akibat gelombang yang terjadi di wilayah perairan Indonesia timur pada awal tahun untuk meng-supply beras kelas Premium. Sementara untuk bawang merah dan putih yang harganya sering berfluktuasi dari

Rp.30.000/kg sampai Rp.50.000/kg untuk bawang merah dan bawang putih ada harga Rp.45.000/kg sampai Rp.55.000/kg yang dikarenakan menggunakan jalur yang sama dengan komoditi lain seperti susu, tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, mentega dan kacang - kacangan. Namun berbeda dengan beras, bawang tidak lama bertahan dan mengalami masa susut yang cepat.

Selain itu, putaran ekonomi di wilayah Kota Namrole sangat kecil, akibat ketergantungan masyarakat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat tinggi, sehingga di awal tahun sangat terasa ketika penyerapan anggaran dari realisasi belanja Pemerintah Daerah yang baru berjalan normal di akhir bulan Januari hingga bulan Februari 2024. Hal ini, menimbulkan banyak barang yang mencapai masa kadaluarsa hingga menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri 1445 H.

Sedangkan untuk Telur, di Kota Namrole peternak telur sudah ada, sehingga tidak seperti tahun - tahun yang lalu, sering mengalami kelangkaan dan kenaikan harga hingga Rp.90.000/rak, peternak telur ayam ras cukup untuk menyeimbangkan harga hingga Rp.65.000/rak saat ini. Cabe rawit dan cabe keriting lebih baik saat ini, dikarenakan jangka panjang dari Program Gertam Cabe Bipolo pada tahun 2023 kemarin masih terdampak hingga saat ini pada triwulan I tahun 2024, mampu bertahan dengan harga Rp.35.000 - Rp.40.000/kg untuk cabe keriting dan Rp.40.000 - Rp.45.000/kg untuk cabe rawit.

Selain itu, akses transportasi sebagai hal utama dalam proses kelancaran distribusi yang berdampak pada ketersediaan barang di setiap Ibu Kota Kecamatan atau sarana prasarana jalan raya untuk menghubungkan Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Kecamatan masih belum terhubung dengan kondisi sebagai berikut :

- Kota Namrole - Wamsisi (Ibu Kota Kecamatan Waesama) sudah baik sampai Ibu Kota Kecamatan saja, 60% desa di Kecamatan Waesama belum terhubung jalan raya, sehingga menggunakan transportasi laut dan darat pada musim panas;
- Kota Namrole - Waelua (Ibu Kota Kecamatan Ambalau) berada di pulau tersendiri dan belum terjangkau ke desa - desa di pulau tersebut, sehingga menggunakan transportasi laut;
- Kota Namrole - Leksula (Ibu Kota Kecamatan Leksula) akses jalan raya dalam proses pembuatan untuk terhubung ke Ibu Kota Kecamatan saja dan belum tersedia akses jalan raya ke desa - desa di Kecamatan Leksula dengan presentase 80% desa belum terhubung ke Ibu Kota Kecamatan, sehingga lebih banyak menggunakan transportasi laut;
- Kota Namrole - Waekatin (Ibu Kota Kecamatan Fena Fafan) berada pada wilayah pegunungan dengan akses jalan belum 100% aspal, sebagian jalan masih menggunakan jalan tanah yang sudah ada badan jalannya, hanya saja belum tersedia jembatan - jembatan untuk menghubungkan jalannya, sehingga, pada awal tahun musim penghujan, akses jalan tidak dapat dilewati akibat banjir dari sungai yang belum ada jembatannya, serta tanah yang licin akibat belum diaspal;
- Kota Namrole - Biloro (Ibu Kota Kecamatan Kepala Madan) berada pada posisi paling ujung barat pulau Buru, dengan jalur akses Biloro - Kota Namrole tidak terjangkau, dikarenakan belum tembus badan jalannya, sehingga akses ke Biloro harus melewati Kota Namlea atau menggunakan transportasi laut;

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari Kondisi serta permasalahan yang ditemui, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan langkah - langkah preventif tepat sasaran, guna mengendalikan masalah kelangkaan stok barang di daerah yang berakibat pada kenaikan harga yang di picu oleh kondisi cuaca ekstreme serta masalah transportasi yang berdampak pada kurang produktifnya proses distribusi barang dan pelayanan jasa di Kota Namrole secara khusus dan secara umum di Kabupaten Buru Selatan. Langkah - langkah tersebut, yakni :

1. Melanjutkan Gerakan Menanam Cabe dikarenakan mampu menyediakan stok untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah yang berdampak pada penekanan harga yang signifikan;
2. Melakukan Pengawasan yang lebih intensif dengan inspeksi rutin dan operasi pasar di Kota Namrole dan Ibu Kota Kecamatan Waesama untuk memastikan ketersediaan stok mencukupi sampai Hari Raya Idul Fitri dengan harga yang melambung tinggi atau penurunan harga akibat masa kadaluarsa yang tersisa 1 - 2 bulan saja. Kondisi barang yang melewati batas produktif konsumsi tersebut, dilakukan penyitaan dan pemusnahan bersama dengan unsur TNI/POLRI;
3. Penyerapan Anggaran Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Triwulan I pun dilakukan percepatan penyerapan anggaran agar supaya ekonomi tidak stag dan dapat tumbuh dengan normal;
4. Melakukan Pemantauan harga secara rutin dilakukan di pasar rakyat Kota Namrole dan pertokoan di wilayah Kota agar dapat cepat tanggap dalam mengidentifikasi pergolakan harga barang kebutuhan pokok yang dipublikasikan pada Videotron milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan sebagai media publikasi untuk diketahui oleh masyarakat;
5. Persoalan transportasi dari dan untuk Kabupaten Buru Selatan (Kota Namrole), melalui Program Tol Laut, seringkali terjadi keterlambatan akibat cuaca, sehingga TPID Kabupaten Buru Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan sebagai Gerai Maritim di daerah, melakukan pengawasan penuh tahapan proses pemuatan di Depo Surabaya, perjalanan hingga pembongkaran di Depo Namrole sesuai estimasi waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan serta menghimbau kepada para pengguna manfaat program tersebut dalam hal ini Consigne Namrole untuk tetap memperhatikan kondisi kualitas barang sebelum dan sesudah sampai di Namrole;
6. Sementara transportasi dari Kota Namrole ke Ibu Kota Kecamatan, selain pemanfaatan jalur darat yang selalu di awasi, mengusulkan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas PUPR untuk pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan yang berstatus jalan provinsi dan Dinas PUPR Kabupaten pun mengalokasikan pembangunan jalan dan jembatan yang berstatus jalan kabupaten. Pemerintah Daerah juga menyediakan Kapal berjenis Roro untuk dapat di fungsikan sebagai sarana penghubung ke daerah - daerah pedesaan;

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Gerakan Menanam Cabe yang diberi nama "GERTAM CABE BIPOLO", perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan tetap menjaga kondisi ketersediaan stok cabe untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Buru Selatan dan dapat menekan harga cabe tidak melambung tinggi serta meningkatkan pendapatan petani cabe di daerah. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan bersinergi untuk membuka peluang pasar bagi para petani, sehingga tidak terjadinya over stok yang menyebabkan kerusakan hasil panen yang tidak terjual;
- Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat Makanan dan Dinas Kesehatan Kabupaten

Buru Selatan dalam menindaklanjuti hasil temuan lapangan, sehingga perlu dilakukannya sosialisasi untuk menghimbau kepada pelaku usaha untuk tidak lagi menjual produk kadaluarsa sesuai ketentuan yang berlaku dan menghimbau masyarakat untuk lebih cerdas dalam memperhatikan kualitas barang sebelum membelinya serta menginformasikan bahaya dari dampak konsumsi barang kadaluarsa tersebut;

- Penyerapan Anggaran dari realisasi belanja pada Triwulan I berjalan di bulan Januari akhir atau Februari pertengahan;
- Pemantauan harga rutin dilakukan hanya pada Ibu Kota Kabupaten (Kota Namrole), sementara 5 kecamatan tidak dilakukan pemantauan rutin, akibat ketersediaan anggaran program sementara biaya transportasi untuk menjangkau kecamatan yang sangat tinggi serta Videotron hanya 1 buah didepan Kantor Bupati Buru Selatan, tidak ada yang di pasang di pasar maupun titik kerumunan masyarakat kota;
- Pengusulan pembangunan sarana prasarana dalam proses pembangunan dan pada tahapan proses yang akan dilakukan dengan bertahap.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat untuk menghubungkan kecamatan - kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten untuk mempermudah akses distribusi barang dan sarana transportasi laut di Kabupaten Buru Selatan untuk mempermudah distribusi bahan pokok agar menjadi jawaban terhadap disparitas harga antara di Kota Namrole dengan di daerah pedesaan yang sangat berbeda jauh. Sehingga diperlukan alokasi anggaran dalam rangka subsidi transportasi untuk mengurangi biaya distribusi barang.
- Memaksimalkan Program Tol Laut untuk dijalankan di awal tahun, serta mengusulkan Kabupaten Buru Selatan mendapatkan trayek sendiri atau digabungkan trayeknya dengan Kabupaten Buru (Namlea), mengingat jarak waktu yang ditempuh untuk trayek -16 dengan rute (Surabaya) Tanjung Perak - Wanci - Namrole terlalu lama, sehingga perlu menggabungkan Namlea - Namrole dalam 1 trayek tersendiri.
- Mengembangkan Program GERTAM CABE BIPOLO secara berkelanjutan.
- Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dalam rangka menggenjot putaran uang untuk ekonomi bergerak tumbuh di daerah.
- Pembuatan Videotron di Pasar Kota Namrole, serta titik - titik keramaian masyarakat.
- Melakukan Sosialisasi serta himbauan dari BPOM dan Dinas Kesehatan terkait "Barang Kadaluarsa".